

**MENANGKAL GERAKAN RADIKALISME DI KALANGAN ASN  
MELALUI PEMAHAMAN NILAI-NILAI BELA NEGARA (DETERMINING THE  
MOVEMENT OF RADICALISM IN ASN THROUGH UNDERSTANDING THE  
VALUES OF STATE MARTIAL)**

**RACHMAT BAHMIM SAFIRI**  
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Email : [rachmatsafiri@gmail.com](mailto:rachmatsafiri@gmail.com)

**ABSTRAK**

Maraknya gerakan radikalisme di kalangan ASN yang merebak di tanah air tentunya mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia maka perlu upaya untuk membendung hal tersebut melalui pemahaman nilai-nilai bela negara. Untuk memberikan kesadaran tersebut berdasarkan konstitusi yang ada di NKRI. Maraknya penyebaran hoax tanpa filter melalui sosial media membuat paham radikal makin subur. Persoalan saat ini adalah adanya gerakan-gerakan radikalisme yang memiliki agenda terselubung yang menggerogoti sendi-sendi negara yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, melemahkan persatuan dan kesatuan – merusak kebhinekaan yang sejak Indonesia berdiri telah menjadi konsensus bersama. Upaya mencegah terjadinya penyebaran paham Ideologi radikalisme di kalangan ASN perlu melibatkan seluruh stakeholder yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan, sosial, keagamaan, komunikasi dan keamanan di lingkungan masing-masing dan pendekatan sampai tindakan hukum.

**Kata Kunci :** Bela negara, radikalisme, menangkal

**PENDAHULUAN**

Radikalisme tidak lain adalah embrio dari hampir setiap tindakan terorisme di belahan dunia. Sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan sosial dan politik secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat tindak kekerasan menyangkut politik ( *political violence*) dan aksi-aksi yang bisa dibilang ekstrim sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi (Moskalenko dan McCaukley, 2009). Fenomena aksi yang merongrong Pancasila di ruang publik, seperti adanya demonstrasi berlatar agama, dugaan makar, kekerasan kelompok intoleran hingga kejahatan radikalisme/terorisme. Ancaman disintegrasi tersebut menjadi nyata yang tidak dapat dipandang mudah, Solusi dari persoalan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun tanggungjawab seluruh komponen bangsa Indonesia. Keragaman untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan nasional sangat penting untuk menjadi perhatian dan penguatan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) memiliki 4 (empat) ciri yang dapat dikenali. *Pertama*, intoleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. *Kedua*, fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. *Ketiga*, eksklusif, yaitu membedakan diri dari umat islam umumnya dan yang keempat adalah revolusioner yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa yang menjadi kriteria adalah :

1. Anti Pancasila.
2. Anti kebhinekaan, anti NKRI
3. Anti Undang-Undang Dasar 45

Mereka tidak mau negara Indonesia berdasarkan asas Pancasila tetapi maunya adalah mereka ingin mengubah negara Indonesia yang Pancasila menjadi negara khilafah ASN, seperti gerakan bervisi pendirian khilafah (HTI), JI, JAD, JAK, FPI dan sebagainya lalu munculnya gerakan ISIS di Indonesia, penghinaan terhadap Pancasila, penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap bendera negara, tuduhan sebagian masyarakat terhadap sebagian

masyarakat yang lain sebagai “anti Pancasila”. dan isu upaya makar terhadap pemerintah. Permasalahan tersebut bermuara pada ideologi radikalisme yang ingin merubah tatanan bangsa Indonesia yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Gerakan radikalisme sebagai suatu paham tidak selalu ditandai dengan berbagai -aksi kekerasan, namun dapat juga sebatas ideologi yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan

Radikalisme yang berkembang di masyarakat dalam bentuk radikalisme ideologi maupun agama harus bisa dicegah. Hal ini diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Untuk melakukan upaya dalam pencegahan gerakan radikalisme tidaklah mudah dan membutuhkan strategi yang terstruktur, sistematis dan masif.

Penting adanya pemahaman yang komprehensif tentang gerakan radikalisme dan melakukan pencegahan melalui pemahaman nilai-nilai bela negara. Pemahaman ini dapat menjadi pola pikir (mindset) yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia sebagai hal yang mutlak hadir, sehingga dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal. Unsur-unsur keagamaan berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme jika diintegrasikan ke dalam nilai-nilai bela negara. Program bela negara dapat dimanfaatkan sebagai sarana menangkal ancaman radikalisme di Indonesia. Adanya pandangan radikalisme tengah berusaha menggeser ideologi Pancasila dan pengaruhnya mulai menyusup ke setiap lapisan masyarakat dan sudah menjadi masalah nasional dan akut yang harus segera dihapuskan melalui pendidikan yang kritis. usia muda termasuk masa rentan menjadi intoleran dan radikal. Karena mereka masuk dalam fase mencari jati diri atau identitas. Perkembangan Radikalisme dalam era globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham radikal muncul terutama dalam media sosial. Radikalisme sendiri merupakan embrio lahirnya terorisme.

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yakni intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), adanya sifat fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), dan bersifat eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) serta revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Permasalahan radikalisme dan telah menjadi salah satu isu kebangsaan karena menjadi citra negatif di mata sebagian dunia sebagai negara yang menjadi lahan subur bagi paham radikalisme dan terorisme, akibat tindakan atau ulah segelintir orang yang terpengaruh dan melakukan tindakan radikal dan teror. Merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat di Indonesia bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas kebangsaan kita. melakukan upaya kolektif mencegah radikalisme dan terorisme dimaksud. Ada beberapa faktor penyebabnya :

1. Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah.
2. Faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya.
3. Faktor kultural, yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah).

## **METODE PENELITIAN**

Peneiltian ini dilakukan bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan, penulis sebagai sumber primer dan sekunder (text book, internet) dan interview secara langsung serta melakukan observasi partisipasi secara langsung. Subyek penelitian adalah 9 orang orang laki-laki dan 4 orang perempuan, kegiatan penelitian dilakukan di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dimulai tanggal 5 September

2020 sampai dengan 10 Nopember 2020. Variabel penelitian dan prosedur pemecahan masalah yang dijadikan sasaran menjawab hal yang dihadapi/dilakukan berdasarkan permasalahan yang timbul setelah diketahui keaktifan subyek dalam berkomunikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyebaran

Radikalisme saat ini sudah menyebar di kalangan ASN. karena mereka sebagian belum dapat berpikir secara matang dan merupakan sasaran empuk untuk dicuci otaknya, memanfaatkan berbagai strategi pengajian, ceramah dan sebagainya untuk menyebarkan pemahamannya mencapai target yang penting kerap disasar berbagai kelompok radikal untuk dipengaruhi dan direkrut sebagai simpatisan gerakan radikal dari kelompok ASN/aparatur negara. Perekrutan melalui berbagai cara dengan memanfaatkan komunikasi di dunia digital tidak melalui pertemuan secara tatap muka melalui konten-konten radikal. membahas mengenai teknik rayuan yang digunakan *websites* para jihadis dengan menggunakan berbagai model retorika, gambar, dan simbol-simbol dalam teks, video, dan format interaktif. Media dimanfaatkan sebagai ladang informasi, namun juga dapat digunakan sebagai teknologi untuk melakukan rayuan atau bujukan radikal.

ASN menjadi sasaran yang menarik dalam kegiatan radikalisme antara lain disebabkan karena terpicat oleh etos perjuangan melawan kebobrokan, penindasan pada lantaran lokal, nasional maupun global yang ada di lingkungan pemerintahan, biasanya yang tertarik mereka yang baru belajar agama atau mualaf, jadi cenderung orang yang baru masuk Islam ingin menunjukkan dia lebih Islam dari siapa saja, untuk itu dia ingin menunjukkan. dirinya bisa melakukan tindak kekerasan / militansi dampak konsekuensi dari kondisi psikologi dan latar belakang kepribadian, namun merupakan implikasi dari resiko terpapar paham radikal dari media sosial / dunia maya.

### 2. Aksi

Tindak kekerasan dan militansi ASN yang terpapar bukan sekadar konsekuensi dari kondisi psikologi dan latar belakang kepribadian mereka, namun merupakan implikasi dari resiko terpapar paham radikal dari media sosial dan dunia maya. Gerakan radikalisme di Indonesia kian mengkhawatirkan dari tahun ke tahun karena mulai masuk dalam lingkungan pemerintahan dalam berbagai bidang, aksi penyebaran narasi dan ideologi kekerasan yang dapat memengaruhi siapa pun. Beberapa aksi yang dilakukan oleh mereka sudah menjadi nyata seperti beberapa kasus di tanah air di seperti aksi-aksi kekerasan dan demo serta sweeping bersama FPI dan kelompok lainnya yang menentang pemerintah Indonesia.

Para pelaku radikalisme sering mengkafirkan sesama penganut agama islam tidak hanya terhadap penganut yang lain, mereka juga memojokkan pemerintah dengan anggapan bahwa pemerintah gagal memberikan rasa aman karena tidak menerapkan sistem khilafah serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ketakutan masyarakat/fear bombing sebagai strategi utamanya.

### 3. Fakta

Di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meskipun berdasarkan observasi yang dilakukan selama 33 hari oleh penulis secara tersembunyi baik secara elektronik maupun kasat mata jumlah ASN yang terpapar radikalisme tidak sampai 1 % namun perlu diwaspadakan karena sewaktu-waktu bisa tumbuh subur tanpa terkendali, kita tidak boleh lengah karena bisa menjadi ancaman setiap saat. Secara signifikan aktivitas mereka dari pantauan yang ditemukan secara empiris di berbagai wilayah masih sebatas mengadakan pertemuan di akhir pekan membahas hal-hal keagamaan di rumah ibadah khusus kelompok mereka. Jumlah dalam setiap kali mereka bertemu sekitar 21 orang/kelompok kecil kecuali hari-hari tertentu bisa mencapai 43 orang termasuk istri dan anak-anaknya ikut serta dalam pertemuan tersebut.

Adapun penampilan secara khas sering kita lihat berbeda dengan masyarakat pada umumnya yaitu :

1. Berpakaian ala Timur Tengah
2. Memelihara kumis dan jenggot
3. Jarang bersosialisasi dengan masyarakat umum dan lebih eksklusif
4. Intoleran dengan sesama muslim dan non muslim
5. Dalam berkomunikasi selalu menonjolkan pendapatnya yang paling benar
6. Sering berpendapat berlandaskan dalil pemahaman kelompoknya
7. Menjunjung tinggi paham khilafah
8. Emosional dalam berdakwah dan mudah mengkafirkan orang lain
9. Senantiasa berseberangan dengan pemerintah

#### 4. Penangkalan

Fenomena radikalisme di kalangan ASN yang dipermudah oleh adanya teknologi internet maka diperlukan berbagai intervensi oleh negara untuk mencegah radikalisasi semakin meluas. Pemerintah harus mempunyai mekanisme untuk membendung konten-konten radikal di internet agar tidak diakses dengan mudah. Selain itu juga harus mampu melakukan pemantauan dan tindakan deteksi dini/cegah dini terhadap aktivitas kelompok-kelompok tertentu yang mengarah kepada perekrutan anggota baru. Untuk mencegah atau mengeliminasi kemungkinan ASN terpapar paham radikalisme dan kemudian menjadi militan harus diakui bukan hal yang mudah. Pemahaman nilai-nilai bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia sebagai hal yang patut dimunculkan, sehingga dapat menangkal berkembangnya gerakan dan ideologi radika dimaksud. Salah Satu Isu yang sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan internasional, termasuk Indonesia telah mendapatkan citra negatif di mata internasional. Citra negatif dimaksud terbentuk karena Indonesia menjadi lahan subur perkembangan radikalisme akibat ulah segelintir orang yang melakukan tindakan teror. Mencegah/menangkal radikalisme adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia bukan hanya wewenang aparat penegak hukum semata, bahkan tidak terpisahkan dari tugas kebangsaan kita. (Harahap,2017).

Unsur-unsur keagamaan berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme bila diintegrasikan secara serius ke dalam nilai-nilai bela negara, program ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana menangkal ancaman radikalisme di Indonesia metode-metode preventif harus menjadi corong utama. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini telah menyusun rencana aksi mendukung penanganan radikalisme yang meliputi :

1. Mendorong pemerintah daerah membuat regulasi atau peraturan daerah seperti surat edaran yang menugaskan aparat sipil negara bekerja sama dengan aparat terkait untuk bekerja sampai ke pedesaan melawan radikalisme
2. Membentuk forum-forum kerukunan umat, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan terorisme. Forum ini harus dipergunakan pemerintah daerah untuk mencegah tindakan radikalisme individu atau kelompok
3. Tim terpadu penanganan konflik sosial harus melaksanakan pemantauan terhadap pelaku aksi radikalisme dan terorisme
4. Aparat di daerah harus memonitor atau memantau keberadaan kelompok-kelompok tertentu semisal warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri dan berpotensi membawa paham-paham radikal
5. Pemerintah harus mendorong semua pihak hingga ormas-ormas di masyarakat untuk bersama menangkal radikalisme

Sedangkan BNPT menggunakan dua strategi untuk menangkal radikalisme yaitu :

1. Kontra radikalisasi Upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai-nilai non-kekerasan.
2. Deradikalisasi Segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner. Negara harus mampu melakukan pemantauan dan tindakan deteksi dini cegah dini terhadap aktivitas kelompok-kelompok tertentu yang mengarah kepada

perekrutan ASN dalam jaringan kelompok radikal. Selain itu negara harus membangun suatu ketahanan pada masing-masing keluarga di Indonesia agar tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dibangun sejak dini yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan organisasi massa untuk membantu pemerintah.

## 5. Pemberantasan

Memberantas gerakan radikal tidak dapat hanya dilakukan dengan metode penindakan, tetapi bagaimana menangkalnya itu yang jauh lebih penting karena spektrumnya lebih luas dan berdampak besar. Ancaman radikalisme menyebar tidak memiliki bentuk, tetapi memiliki dampak signifikan. Kita baru dapat mendeteksi radikalisme ketika pelakunya sudah berbuat sesuatu. Manifestasi tindakannya dapat dikenai tindak pidana, baik pidana umum maupun terorisme. Bela negara dan radikalisme seperti yang sudah disebutkan penulis di atas, bela negara sangat terkait dengan pendekatan yang bersifat keamanan manusia. Radikalisme terus menyebar ke berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks inilah, darurat radikalisme mesti diperhatikan sebagai ancaman bagi kedaulatan negara dan keamanan masyarakat. Keamanan manusia ini adalah metode yang efektif untuk memberantas ancaman yang dikategorikan sebagai ancaman non-konvensional. Dewasa ini, isu-isu non-militer (nonkonvensional) dapat menjadi isu-isu yang sa. Hal yang kasat mata harus ditanggulangi secara serius adalah menaggulangi teroris. UU Nomor 15 Tahun 2003 pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perbuatan yang sangat terkait keamanan, dengan demikian dapat dikategorikan dengan status "keamanan nasional". Perubahan the nature of security makin terlihat jelas. Pemerintah secara resmi membubarkan dan menghentikan segala aktifitas Front Pembela Islam (FPI) yang telah disetujui oleh enam pejabat tinggi di kementerian maupun lembaga negara (Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Jaksa Agung, BNPT berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menegaskan akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme dan terlibat dalam kegiatannya atau berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan terlarang yang telah dicabut status Badan Hukumnya, dengan ancaman menjatuhkan sanksi bila melanggar peraturan disiplin yang ada mulai dari non job hingga pemecatan. Tindakan tegas untuk melawan radikalisme di kalangan ASN secara bersungguh-sungguh agar tidak mengancam NKRI dan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Ketegasan sebagaimana disebut di atas dengan adanya penerbitan SE Bersama No.02/2021 dan No.2/SE/I/2021 yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengenai larangan, pencegahan, serta tindakan terhadap ASN yang berafiliasi/mendukung organisasi terlarang atau ormas tanpa dasar hukum. Penanggulangan radikalisme dan gerakan teroris, khususnya di Indonesia harus memfokuskan pada peran aktif masyarakat sipil sebagai kekuatan yang sangat penting dalam proses deradikalisasi tidak mutlak pemerintah yang dominan mengatasinya, secara bersama-sama mengatasinya agar mempercepat kehidupan bernegara yang aman dan nyaman (A.S Hikam, 2016).

## 6. Pemahaman nilai-nilai bela negara

Definisi bela negara adalah sebuah konsep yang menarik jika dikaitkan dengan konteks sistem pertahanan Indonesia, karena sifatnya yang berbeda dengan wajib militer, seperti yang umumnya dikenal dalam konteks sistem pertahanan militer. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme

seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut (Subagyo,2015). Untuk itu, baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi bela negara yang sesuai dengan aturan undang-undang di Indonesia. Menurut pasal 27 ayat (3) UUD 195 yang berbunyi :Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta daa upaya pembelaan negara” dan Undang undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Di era milenial sekarang ini bela negara itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing, bagaimana upaya kita membangun sebuah kehidupan di bidangnya masing-masing sesuai dengan profesi kita untuk mewujudkan yang terbaik demi ketentraman bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedamaian.

Radikalisme merusak sendi-sendi sosial masyarakat sehingga masyarakat Indonesia yang cinta damai dan cinta tanah air ini bisa dimanipulasi oleh pemikiran sempit yang menghalalkan penghilangan nyawa manusia. Untuk itu, sudah selayaknya sistem pertahanan Indonesia mulai dirancang untuk menyesuaikan dengan ancaman jenis ini. Salahsatu caranya adalah dengan implementasi program bela negara. Gerakan radikal bukan sekedar kejahatan biasa, tetapi ancaman besar bagi keutuhan dan keselamatan bangsa. Pemahaman nilai-nilai bela negara diharapkan dapat mengubah dan mempengaruhi secara positif pola pikir anak muda Indonesia agar tidak terpengaruh doktrin-doktrin keagamaan yang salah dan pastinya juga sesat. bela negara harus diimplementasikan secara serius dan komprehensif, serta diikuti segenap komponen masyarakat.. Dalam rangka mengantisipasi semakin maraknya keterlibatan anak muda dalam pusaran ideologi radikalisme, negara perlu mempertimbangkan hal-hal berikut seperti mendesain materi dan metode bela negara yang relevan dengan karakteristik psikologis anak muda, mengatasi dislokasi dan deprivasi sosial anak-anak muda melalui program pelibatan sosial (social inclusion), serta penanaman wawasan keagamaan (religiusitas) yang terintegrasi.

Untuk memberikan penekanan terhadap pemahaman terhadap nilai-nilai bela negara tersebut aka peru ditanamkan sebagai berikut :

- a. Kecintaan kepada tanah air
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara rela berkorban untuk bangsa dan Negara
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
- e. Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupu fisik
- f. Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat,adil dan makmur

Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas bisa dipahami bahwa upaya bela negara dapat dipahami dalam bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oeh kecintaannya kepada negara, meyakini ideologi dan taat terhadap perundang-undangan yang diatur oeh negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemahaman kesadaran bela negara terhadap setiap warga negara terutama generasi muda milenial sebagai pewaris dan penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting agar sanggup mempertahankan negara dari ancaman yang ada seperti radikaise,penanaman nilai – nilai bela negara harus ditanamkan sejak usia dini.

## **PENUTUP**

Penggunaan kekerasan dan dampaknya dalam kehidupan sosial menjadi ciri-ciri khas dari radikalisme, yang dimanifestasikan melalui tindakan terorisme. Kemudian,bela negara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban

membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Ancaman non-militer atau ancaman konvensional seperti radikalisme adalah tantangan baru di era global ini bagi Kemhan, TNI, dan Kepolisian juga tentunya, sebagai upaya mempertahankan negara. Setiap stake holder pertahanan di Indonesia harus terlibat dalam upaya. Untuk itu, program bela negara harus digalakkan sebagai bagian pencegahan berkembang pesatnya paham-paham radikal.

Memberantas gerakan radikal tidak dapat hanya dilakukan dengan metode penindakan, tetapi bagaimana mencegahnya itu yang jauh lebih penting karena spektrumnya lebih luas dan berdampak besar. Program bela negara diharapkan dapat mengubah dan mempengaruhi secara positif pola pikir masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh doktrin-doktrin keagamaan yang salah dan pastinya juga sesat. Bela negara harus diimplementasikan secara serius dan komprehensif, serta diikuti segenap komponen masyarakat sehingga memberikan efek positif karena adanya aktor non negara yang memberikan sumbangan dalam demokratisasi di tanah air dan berperan serta membantu negara menghadapi permasalahan pemberantasan radikalisme. Menurut Abdul Halim dkk : Kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Sejarah berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diperoleh melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan, tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi seluruh komponen bangsa. Karena upaya bela negara sebagai wujud cinta tanah air harus dimiliki seluruh anak bangsa. Meski pergeseran terjadi bahwa bela negara sudah tidak identik hanya dengan angkat senjata, namun bela negara dapat dilakukan dari berbagai aspek.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul dkk. (2020). *Bela Negara: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- McCauley, C. dan Moskalenko, S. (2008). *Mechanisms of Political Radicalization Pathways Toward Terrorism. Terrorism and Political Violence*. Oxford : Oxford University Press.
- Golose, Petrus R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan
- Hikam, A.S., Muhammad. (2016). *Deradikalis-Peran Masyarakat Sipil Indonesia membendung Radikalisme*. Jakarta : Kompas
- Harahap Syahrin. (2017). *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan terorisme*. Depok : Siraja.
- Sartono, Kartidjo. (1985). *Radikalisme*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subagyo, Agus. (2015). *Bela Negara : Peluang dan tantangan di era globalisasi*. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Zen, Fathurin. (2012). *Radikalisme Retoris*. Jakarta: Bumen Pustaka Emas.